

27 April 2005

**11. Ulasan: *Peristiwa cuaca ekstrim sebagai pemicu terjadinya perubahan dalam proses pengelolaan DAS dan praktek-praktek penggunaan lahan***

(Review: *Extreme climatic events as drivers of change in watershed processes and in land use practices*)

Terjadinya badai dan banjir yang cukup parah dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong diterbitkannya pertauran yang melarang penebangan pohon di China dan Muangthai, pemberantasan penebangan liar di Filipina, dan larangan-larangan lain dalam praktek penggunaan tanah di daerah hulu di seluruh wilayah Asia Tenggara, India dan China. Peristiwa tersebut juga telah membangkitkan perhatian masyarakat terhadap masalah penggundulan hutan di Haiti, dan praktek usaha tani yang merugikan upaya konservasi di Honduras. Adanya peraturan yang melarang penebangan dan penggembalaan secara liar, memang sangat baik walaupun hal itu hanya memecahkan sebagian saja dari permasalahan yang kompleks yang mungkin disebabkan oleh banyak faktor, misalnya, dalam mengatasi masalah penggundulan hutan penerapan peraturan yang melarang penebangan liar seringkali merupakan pendekatan yang paling tidak signifikan pengaruhnya. Di sisi lain, terjadinya bencana-bencana tersebut telah mengalihkan perhatian masyarakat dari akar permasalahan degradasi DAS yang sebenarnya, yang lebih merupakan masalah politik yang sulit diatasi dan merupakan ancaman tersembunyi yang lebih membahayakan.

Sebagai contoh, di pulau Luzon di bagian selatan Filipina, peristiwa banjir dan tanah longsor pada tahun 2004 yang terjadi setelah 4 taufan normal yang berlangsung secara cepat dan terus menerus, dinyatakan sebagai akibat penebangan liar. Sebagaimana didiskusikan dalam laporan terakhir dari The Asia Forest Network oleh Inoguchi, Soriaga dan Walpole (2005), penebangan liar memang merupakan suatu masalah. Namun penyebab yang lebih nyata dari bencana tersebut, dan juga dalam bencana-bencana serupa sebelumnya, sebenarnya adalah adanya pemukiman sepanjang bantaran sungai, kegagalan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan lahan yang sesuai untuk relokasi para penghuni liar, serta keberadaan tanaman kelapa sepanjang jalur banjir yang tumbang dan selanjutnya menambah sampah yang terhanyut. Disamping itu sangatlah penting untuk membedakan antara penebangan liar yang dilakukan oleh para pedagang kayu dengan berbagai pemanfaatan hutan yang ilegal tetapi seringkali telah ada secara tradisi dalam masyarakat di daerah hulu yang kekurangan hak-hak formalnya. Mungkin masalah yang paling sulit diatasi adalah yang berkaitan dengan kepastian hukum pemilikan lahan bagi penduduk di daerah hulu, karena tanpa kepastian tersebut mereka tidak memiliki jaminan untuk dapat menikmati manfaat-manfaat yang diciptakan dari kegiatan konservasi atau kegiatan pembangunan. Hal ini dapat terjadi karena tanpa adanya kepastian kepemilikan lahan maka penduduk di daerah hulu tidak berada dalam posisi untuk bernegosiasi dan dilibatkan didalam kontrak kesepakatan yang dirancang untuk melindungi jasa DAS. Oleh karena itu, mereka hanya memiliki sedikit insentif untuk bekerjasama dengan segala perubahan yang diperlukan dalam praktek pemanfaatan lahan atau, sebagaimana kasus di Haiti, membiarkan pohon-pohon tumbuh.

Meskipun terjadi pada waktu yang tidak menentu dan menyebar tidak merata sepanjang DAS bagian hulu yang memiliki kondisi biofisik dan tingkat kerawanan yang sangat beragam, kejadian yang ekstrim seharusnya tidak merupakan kejutan lagi. Perubahan-perubahan yang terjadi di sepanjang DAS seringkali hanya menjadi bagian dari serangkaian peristiwa-peristiwa yang berlangsung sebelumnya, yang merupakan dampak kumulatif dari praktek pemanfaatan lahan. Sebagai contoh, sedimentasi

mungkin saja tidak menjadi masalah jika tidak ada badai yang cukup besar dan mengisi reservoir suatu bendungan dengan sedimen. Dalam suatu kejadian pada tahun 1993 di bendungan Kulekhani (Nepal) – dekat Kathmandu, jumlah sedimen yang mengendap dalam reservoir meningkat dengan cepat setelah terjadinya badai yang membawa 540 mm curah hujan selama 24 jam (Dixit dan Ahmed, 1999). Bagaimanapun juga, sulit dijelaskan apakah adanya perubahan dalam praktek pemanfaatan lahan akan dapat mencegah terjadinya peningkatan endapan tersebut. Begitu pula pada kasus Pegunungan Himalaya yang dikenal memiliki curah hujan yang paling tinggi di dunia dan laju erosi alamiah yang tinggi pula, sulit dijelaskan apakah perubahan-perubahan dalam pemanfaatan lahan akan memiliki pengaruh signifikan terhadap laju erosi di kawasan tersebut.

Karena kejadian-kejadian ekstrim tersebut diatas telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jasa-jasa yang disediakan oleh DAS maka secara teoritis hal itu dapat pula membuka peluang untuk membangun lembaga-lembaga yang lebih efektif yang diperlukan guna mendukung manajemen DAS yang baik serta menurunkan kerawanan terhadap kejadian ekstrim di masa mendatang. Lembaga-lembaga seperti asosiasi para stakeholder atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya seringkali terbentuk pada saat krisis terjadi. Lembaga-lembaga ini juga memegang peranan penting dalam mengimplementasikan pembayaran jasa DAS yang salah satunya mungkin akan membentuk tekanan politis yang biasanya diperlukan untuk mengungkapkan akar permasalahan yang sebenarnya, seperti kurangnya kepastian hukum dalam kepemilikan lahan.

Seperti yang disebutkan oleh Gordon “Reds” Wolman, krisis sesaat yang disebabkan oleh kejadian ekstrim akan mendapat perhatian masyarakat luas, dan kadangkala krisis tersebut memang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang sangat mendesak. Meskipun upaya antisipasi krisis yang dilakukan biasanya lebih ditujukan untuk mengurangi kerawanan terhadap kejadian-kejadian ekstrim di masa yang akan datang, tetapi krisis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai moment penting untuk menyampaikan pesan-pesan yang dapat menumbuhkan pandangan jangka panjang. Dengan kata lain, perhatian masyarakat terhadap penyakit-penyakit yang tersembunyi tetapi lebih membahayakan kadangkala hanya dapat dibangkitkan melalui introspeksi atau mawas diri, setelah terjadi bencana yang menyeluruh.